



Laporan Kinerja

TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Disusun oleh:

DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerja sama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Payau, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan I tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik. LKj Direktorat Ikan Air Payau tahun 2025 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Payau dalam periode tahun 2025.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur dan memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Payau, serta menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan

Jakarta, 17 April 2025
Direktur Ikan Air Payau



Fernando J. Simanjuntak, S.St.Pi., M.Pi.
NIP. 19780523 200212 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja Direktorat Ikan Air Payau merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Payau tahun 2025 yang memuat indikator kinerja, target yang akan dicapai, realisasi kinerja, kendala/permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan indikator kinerja, dan rencana aksi sebagai bentuk rekomendasi yang akan dilaksanakan di periode yang akan datang.

Direktorat Ikan Air Payau telah menetapkan peta strategis tahun 2025 dengan 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) dan 21 (dua puluh satu) kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Sasaran kegiatan satker Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut:

1. SK-1 : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau. Kegiatan ini memiliki 14 (empat belas) IKU, yaitu:
 - a) Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT sebanyak 6.411 ekor;
 - b) Produksi Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT sebanyak 191.744 ekor;
 - c) Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat sebanyak 2.964.669 ekor;
 - d) Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat sebanyak 40.058.988 ekor;
 - e) Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi untuk Operasional UPT sebanyak 94.670 kilogram;
 - f) Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) sebanyak 207 unit;
 - g) Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebanyak 5.576 sampel;
 - h) Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji sebanyak 210 sampel;
 - i) Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji sebanyak 250 sampel;
 - j) Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau sebanyak 151 sampel;
 - k) Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji sebanyak 122 sampel;
 - l) Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau sebanyak 6 rekomendasi kebijakan;
 - m) Irigasi Perikanan yang Dikelola secara Partisipatif (PITAP) sebanyak 25 unit;
 - n) Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP) sebanyak 7 unit.
2. SK-2: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau. Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) IKM, yaitu:
 - a) Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 84;
 - b) Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 81;

- c) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 100 persen;
- d) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 85 persen;
- e) Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 80 persen;
- f) Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 65 persen;
- g) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 70.

Berdasarkan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sebanyak 5 (lima) indikator kinerja telah dilakukan penghitungan capaian realisasi kegiatan dengan target yang telah ditentukan pada tahun 2025, adapun indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan 1 yaitu 130.000 ekor dari target tahun 2025 sebanyak 2.964.669, dengan realisasi yang tercapai adalah 307.000 ekor, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan 1. Tindak lanjut dari capaian ini yaitu perlunya terus mendorong produksi benih ikan air payau untuk disalurkan ke masyarakat sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan 1 yaitu 6.000.0000 ekor dari target tahun 2025 sebanyak 40.058.988, dengan realisasi yang tercapai adalah 6.800.000 ekor, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan 1. Tindak lanjut dari capaian ini yaitu perlunya terus mendorong produksi benih udang untuk disalurkan ke masyarakat sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan 1 yaitu 1.365 sampel dari target tahun 2025 sebanyak 5.376 sampel, dengan realisasi yang tercapai adalah 4.774 sampel, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan 1. Tindak lanjut dari capaian ini yaitu perlunya berkoordinasi dengan UPT yang memberikan pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan 1 yaitu 85 persen dari target tahun 2025 sebanyak 85 persen, dengan realisasi yang tercapai adalah 92,86 persen, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan 1.
5. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan 1 yaitu 80 persen dari target tahun 2025 sebanyak 80 persen, dengan realisasi yang

tercapai adalah 80 persen, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan 1. Tindak lanjut dari capaian ini yaitu tetap meningkatkan persentase pelayanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Payau sehingga persentase capaian dapat terus meningkat.

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian beberapa IKU yang masih belum mencapai target maka menjadi perhatian bagi satker Direktora Ikan Air Payau pada beberapa kegiatan pendukung IKU dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan senantiasa melakukan perbaikan kinerja dalam rangka mendorong tercapainya indikator kinerja Direktorat Ikan Air Payau yang efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Maksud dan Tujuan	10
1.3 Tujuan dan Fungsi	11
1.4 Sumber Daya Manusia	12
1.5 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya	13
1.5.1 Potensi	14
1.5.2 Permasalahan	15
1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	17
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	17
2.2 Sasaran Strategis	18
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2024	19
2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2024	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Analisis Capaian Kinerja	25
3.2.1 SK-1 : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	25
IKU 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT	25
IKU 2. Produksi Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT	26
IKU 3. Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat.....	27
IKU 4. Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat	29
IKU 5. Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT untuk Operasional UPT.....	30
IKU 6. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibinda Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB).....	31
IKU 7.Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	33
IKU 8. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji.....	34
IKU 9. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji	35
IKU 10.Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau	36
IKU 11. Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji.....	37

IKU 12. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	38
IKU 13. Irigasi Perikanan yang Dikelola Secara Partisipatif	39
IKU 14. Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture.....	40
3.2.2 SK-2: Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan	
IKU 15. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau	41
IKU 16. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau.....	42
IKU 17. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	45
IKU 18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau	46
IKU 19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau.....	47
IKU 20. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau.....	48
IKU 21. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau	49
BAB IV. Penutup	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Ikan Air Payau	13
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Payau Selama Periode Triwulan I Tahun 2025	23
Tabel 3. Capaian IKU Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT	26
Tabel 4. Capaian IKU Produksi Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT ..	27
Tabel 5. Capaian IKU Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	28
Tabel 6. Capaian IKU Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat.....	30
Tabel 7. Capaian IKU Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT untuk Operasional UPT	31
Tabel 8. Capaian IKU Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)	32
Tabel 9. Capaian IKU Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	33
Tabel 10. Capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji.....	34
Tabel 11. Capaian IKU Sampel Monitoring Resiud Ikan Air Payau yang Diuji	35
Tabel 12. Capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau.....	36
Tabel 13. Capaian IKU Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji	37
Tabel 14. Capaian IKU Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	38
Tabel 15. Capaian IKU Irigasi Perikanan yang Dikelola secara Partisipatif (PITAP)	39
Tabel 16. Capaian IKU Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)	40
Tabel 17. Capaian IKU Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau.....	42
Tabel 18. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau	44
Tabel 19. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	45
Tabel 20. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau	46
Tabel 21. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau	47
Tabel 22. Capaian IKU Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau	48
Tabel 23. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Payau	12
Gambar 2. Keragaan Jabatan di Direktorat Ikan Air Payau.....	13
Gambar 3. Luas Perikanan Budi Daya Eksisting Tahun 2020.....	14
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Dit. Ikan Air Payau Tahun 2025.....	21
Gambar 5. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan I tahun 2025	22
Gambar 6. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN	43

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024.

Rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memuat arah kebijakan, sasaran strategis, program dan kegiatan serta dukungan terhadap program prioritas nasional yang selaras dengan 8 (delapan) misi Asta Cita yang terdiri atas : (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan

lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dengan ditetapkannya arah dan kebijakan serta kegiatan pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 2 (dua) perspektif dengan masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya KKP untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 17 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan I tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Payau. Tujuan penyusunan

LKj Direktorat Ikan Air Payau Triwulan 1 tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Payau selama tahun periode Triwulan 1 tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budi daya ke depan sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

1.3. Tujuan dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Ikan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas ikan air payau. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Payau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

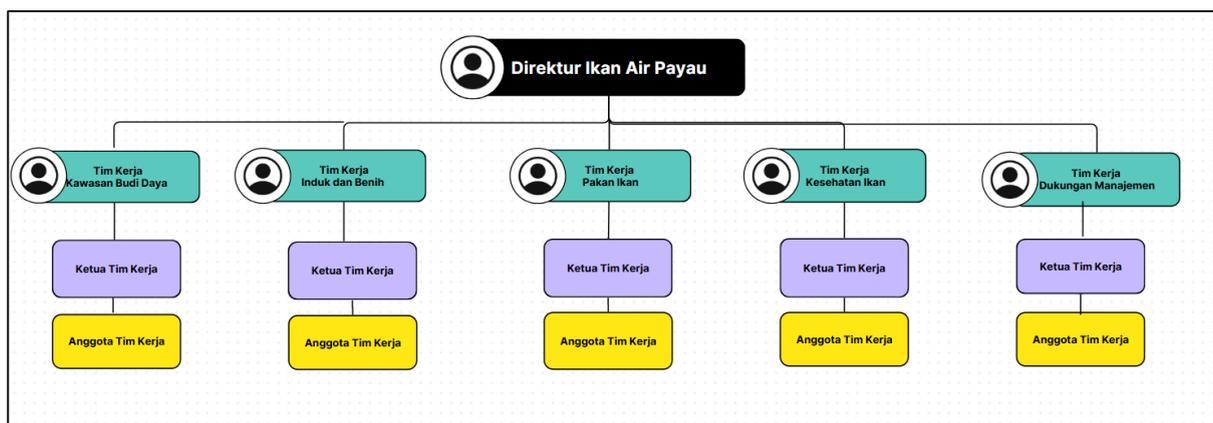
- (i) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (ii) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (iii) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan,

pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;

- (iv) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (v) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Payau

1.4. Sumber Daya Manusia

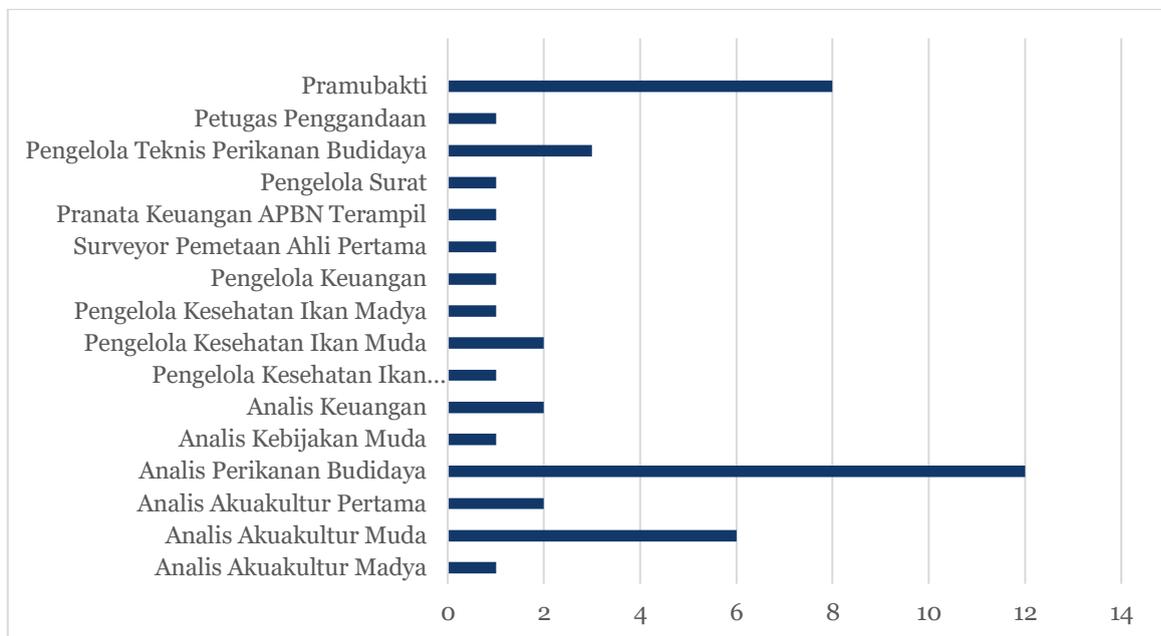
Sesuai dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 terjadi perubahan mekanisme kerja baru di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, salah satunya adalah dengan melakukan perubahan organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya menjadi Direktorat Ikan Air Payau. Sehingga susunan struktur organisasi Direktorat Ikan Air Payau di tahun 2025 terdiri atas Direktur Ikan Air Payau dan 5 (lima) Tim kerja. Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Payau

Jumlah pegawai Direktorat Ikan Air Payau sampai dengan Maret tahun 2025 berjumlah 44 orang yang terdiri dari pegawai PNS sejumlah 36 orang, dan tenaga

kontrak sejumlah 8 orang. Data pegawai jika dilihat berdasarkan jenis jabatan di Direktorat Ikan Air Payau masih terbagi menjadi dua yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Keragaan pejabat fungsional umum dan tertentu Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan Jabatan di Direktorat Ikan Air Payau

Sedangkan Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 11 orang (25%); (ii) S1 sejumlah 25 orang (56,81%); (iii) D3 sejumlah 3 orang (6,81%); dan (iv) SLTA/D1/D2 sejumlah 5 orang (11,36%).

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Ikan Air Payau

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)	%
1.	Magister (S2)	11	25
2.	Sarjana (S1/D4)	25	56,81
3.	Diploma (D3)	3	6,81
4.	SLTA/ DI /D2	5	11,36
Jumlah		44	100

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

1.5.1. Potensi

Berdasarkan jenis tipologi ekosistem maka luas potensi perikanan budi daya dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perikanan budi daya laut, perikanan budi daya air payau, dan perikanan budi daya air tawar. Luas total potensi lahan perikanan budi daya di Indonesia mencapai 17,92 juta hektar yang terdiri dari 12,12 juta hektar potensi budi daya laut; 2,96 juta hektar lahan perikanan budi daya air payau; dan 2,84 juta hektar potensi budi daya air tawar.

Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,16 persen untuk budi daya air tawar, 22,92 persen pada budi daya air payau dan 0,84 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Pemanfaatan lahan perikanan budi daya masih sangat kecil dengan rata rata sebesar 11,31 % dengan rincian berikut: (i) 102.254 hektar (0,84%) untuk perikanan budi daya air laut; (ii) 679.448 hektar (22,92%) untuk perikanan budi daya air payau; (iii) 287.521 hektar (10,16%) untuk perikanan budi daya air tawar (Satudata KKP 2022).

No.	Jenis Budidaya <i>Type of Aquaculture</i>	Potensi <i>Potency</i> ¹⁾	Pemanfaatan <i>Usage</i> ²⁾	Peluang Pengembangan <i>Developing Opportunity</i>	Persentase Pemanfaatan Lahan Budidaya <i>Percentage of Usage Aquaculture Area</i>
1	Laut - <i>Marine culture</i>	12.123.383	102.254	12.021.129	0,84
2	Payau - <i>Brackishwater culture</i>	2.964.331	679.448	2.284.883	22,92
3	Tawar - <i>Freshwater culture</i>	2.830.540	287.521	2.543.019	10,16

Keterangan -Note :

¹⁾ Data berdasarkan buku saku statistik perikanan budidaya tahun 2015;

²⁾ Data berdasarkan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan 2020

Gambar 3. Luas Perikanan Budi Daya Eksisting Tahun 2020
(Sumber: Jurnal Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2022, ISSN 2829-7660. Volume 1 Tahun 2022)

Ditinjau dari aspek ekonomi, dan sosial perikanan budi daya merupakan salah satu subsektor yang mempunyai potensi dan peran strategis sebagai alternatif untuk peningkatan perekonomian nasional, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan nasional. Potensi produksi perikanan budi daya di Indonesia diestimasi mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai 251 miliar US Dolar (Dahuri 2018). Pengembangan perikanan budi daya diestimasi akan menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 15 juta orang pada tahun 2030, apabila kebijakan peningkatan produksi yang berorientasi ekspor dan domestik diimplementasikan secara tepat dan

berkelanjutan di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor perikanan budi daya mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Food Agriculture Organization* (FAO), menyebutkan bahwa perikanan budi daya mempunyai relevansi terhadap pencapaian SDGs terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional (*goal 1*), motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan pembudi daya dan penciptaan lapangan kerja (*goal 4*), menjamin ketersediaan suplai ikan melalui peningkatan produksi ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*goal 12*), dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan (*goal 14*).

1.5.2. Permasalahan

Perikanan budi daya merupakan salah satu sektor alternatif yang diharapkan menjadi sumber devisa negara dan tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penyediaan gizi, dan ketahanan pangan nasional. Perikanan budi daya menjadi pilihan logis yang sangat mungkin dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan setelah terjadinya stagnasi produksi perikanan tangkap dalam beberapa tahun terakhir (FAO 2007). Potensi perikanan budi daya yang dimiliki Indonesia sangat besar karena tidak hanya didasarkan pada aspek dua dimensi dari ruang namun secara lebih luas dapat dilihat dari tiga dimensi ruang termasuk kedalaman air. Namun pembangunan sektor perikanan budi daya di Indonesia belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan selama ini.

Permasalahan dan tantangan dalam mengoptimalkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan sangat kompleks dimana dalam hal ini dibagi menjadi permasalahan umum, permasalahan internal, dan permasalahan eksternal.

Permasalahan umum yang dihadapi Direktorat Ikan Air Payau dalam peningkatan produksi perikanan budi daya adalah 1) ketersediaan benih di sentra budi daya yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, 2) disparitas antara lokasi sentra produksi yang potensial dikembangkan (seperti daerah terpencil, wilayah timur, dan wilayah perbatasan) dengan sentra sarana dan prasarana seperti pakan ikan, peralatan dan mesin penunjang budi daya, 3) musibah banjir dan bencana alam di sentra budi daya yang menyebabkan kegagalan panen dan rusaknya prasarana budi daya, 4) munculnya penyakit baru dan serangan penyakit pada komoditas utama budi

daya sehingga meningkatkan biaya produksi atau kegagalan panen, 5) kurangnya kemampuan beradaptasi pelaku usaha terhadap perubahan dalam usaha budi dayanya (perubahan iklim, perkembangan teknologi, peningkatan persyaratan pasar dan persaingan usaha)

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Direktorat Ikan Air Payau dalam pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan adalah 1) keterbatasan anggaran dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diberikan, 2) sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, 4) keterbatasan kesempatan untuk melakukan sinergitas dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan usaha budi daya.

Sedangkan permasalahan eksternal dalam pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan yaitu 1) kurangnya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain seperti asosiasi dan pemerintah daerah, 2) kompleksnya perizinan berusaha bagi pembudi daya di Indonesia, 3) lemahnya stabilitas usaha budi daya bagi skala mikro dan kecil yang menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga pembiayaan (tidak *bankable*), 4) meningkatnya persyaratan produk perikanan budi daya di pasar nasional dan internasional, 5) keterlibatan berbagai pihak dalam penguatan kelembagaan usaha budi daya belum optimal.

Tantangan dalam pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan di masa sekarang yaitu: (i) penurunan daya beli konsumen sehingga usaha budi daya harus efisien dan menghasilkan ikan dengan harga terjangkau, (ii) isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan budi daya sehingga pelaksanaan kegiatan budi daya harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan; (iii) perkembangan teknologi dan perubahan demografi penduduk sehingga perlu penyesuaian dalam kegiatan usaha budi daya dan pemasaran hasilnya. (iv) persaingan ekspor akibat peningkatan produksi budi daya di beberapa negara lain berkembang lebih pesat dengan harga yang bersaing; (v) meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap kegiatan budi daya.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan 1 tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau selama kurun waktu Triwulan 1 tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Ikan Air Payau serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Ikan Air Payau, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2025 – 2029, rencana kerja dan anggaran tahun 2025, penetapan kinerja Direktorat Ikan Air Payau serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Ikan Air Payau.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Ikan Air Payau serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 telah diterbitkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045.

RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang

harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Terkait dengan program pembangunan perikanan budi daya, KKP memiliki beberapa rencana kegiatan antara lain produksi benih dan induk unggul, produksi pakan ikan, pembinaan sertifikasi subsektor pembudidayaan ikan, monitoring residu, penyakit ikan, dan pemantauan resistensi anti mikroba, pengembangan budidaya komoditas unggulan berbasis klaster, pembangunan kampung perikanan budidaya, bantuan benih dan calon induk ikan, pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP). Klaster kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng, dan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Ikan Air Payau sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Dalam penyusunan peta strategi terdapat empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* yang dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau:
 - a. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT (Ekor);
 - b. Produksi Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT (Ekor);
 - c. Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat (Ekor);
 - d. Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat (Ekor);
 - e. Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT untuk Operasional UPT (Kg);

- f. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit);
 - g. Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel);
 - h. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel);
 - i. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel);
 - j. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel);
 - k. Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji (Sampel);
 - l. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau (Rekomendasi Kebijakan);
 - m. Irigasi Perikanan yang Dikelola secara Partisipatif (PITAP) (Unit);
 - n. Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP) (Unit).
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau:
- a. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai);
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau (Indeks);
 - c. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Persen);
 - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen);
 - e. Persentase Layanan Perkantora Direktorat Ikan Air Payau (Persen);
 - f. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen);
 - g. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai).

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja Dit. Ikan Air Payau tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMIAN www.kkp.go.id SUREL djperpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Irma Minarti HRP**
Jabatan : **Pjt. Direktur Ikan Air Payau**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Pjt. Direktur Ikan Air Payau



Irma Minarti HRP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi UPT (ekor)	6.411
	2. Produksi Calon Induk Unggul Udang yang diproduksi UPT (ekor)	191.744
	3. Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	2.964.669
	4. Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	40.058.988
	5. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi UPT untuk operasional UPT (kg)	94.670
	6. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit)	207
	7. Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)	5.376
	8. Sampel monitoring penyakit ikan air payau yang diuji (sampel)	210
	9. Sampel monitoring residu ikan air payau yang diuji (sampel)	250
	10. Sampel surveilan resistensi antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau (sampel)	151
	11. Sampel nutrisi pakan dan obat ikan yang diuji (sampel)	122
	12. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau (rekomendasi kebijakan)	6
	13. Inisiasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) (unit)	25
	14. Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP) (unit)	7
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen	15. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	84

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Produksi dan Usaha Budidaya	11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai)	82
	12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	80
	13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	94
	14. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	80
	15. Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA (persen)	91
	16. Indeks layanan perkantoran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	80

Jakarta, 18 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Pjt. Direktur Produksi dan Usaha Budi Daya

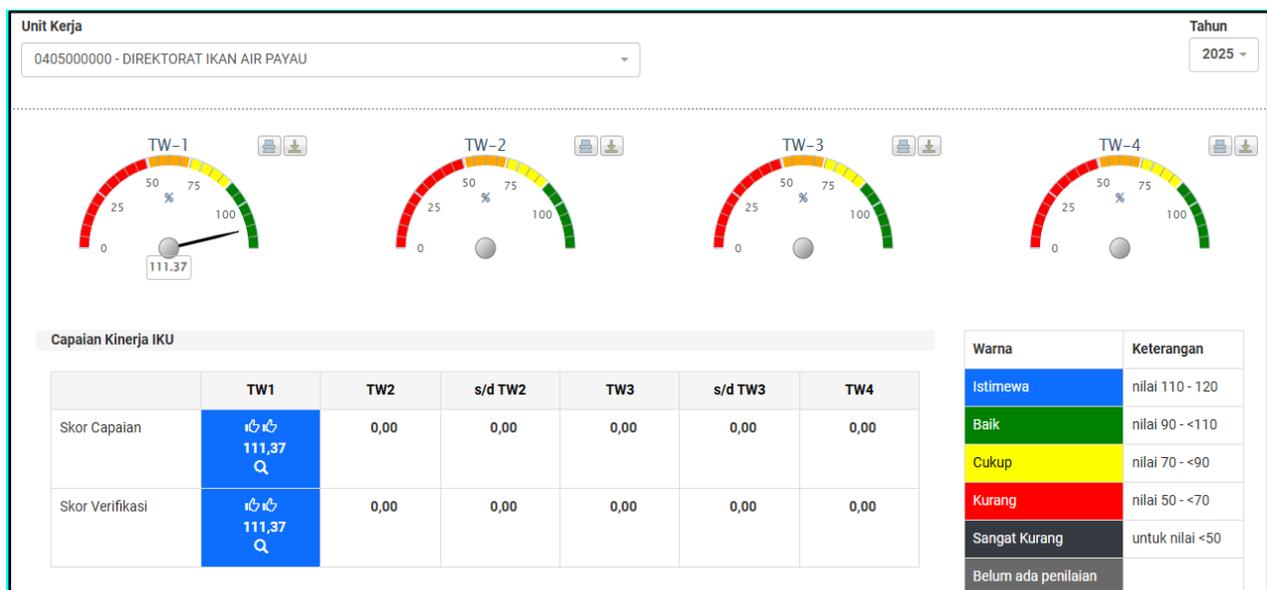


Irma Minarti HRP

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Dit. Ikan Air Payau Tahun 2025

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemmentasi Aplikasi BSC <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi. Berikut hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan I tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi kinerjaku.



Gambar 5. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan I tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Ikan Air Payau menitikberatkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi DJPB dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> diperoleh Nilai Pencapaian sebesar 111,37% (*Seratus sebelas koma tiga tujuh persen*). Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau pada periode Triwulan I tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Payau Selama Periode Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET TW 1	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi UPT (ekor)	6.411	-	-	-
		2. Produksi Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT (ekor)	191.744	-	-	-
		3. Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat (ekor)	2.964.669	130.000	307.000	120,00%
		4. Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat (ekor)	40.058.988	6.000.000	6.800.000	113,33%
		5. Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT untuk Operasional UPT (kg)	94.670	-	-	-
		6. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit)	207	-	-	--
		7. Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium	5.376	1.365	4.774	120,00%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET TW 1	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
		Kesehatan Ikan dan lingkungan (sampel)				
		8. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (sampel)	210	-	-	-
		9. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (sampel)	250	-	-	-
		10. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (sampel)	151	-	-	-
		11. Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji (sampel)	122	-	-	-
		12. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau (rekomendasi kebijakan)	6	-	-	-
		13. Irigasi Perikanan yang Dikelola secara Partisipatif (PITAP) (unit)	25	-	-	-
		14. Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP) (unit)	7	-	-	-
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	15. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	84	-	-	-
		16. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau (indeks)	81	-	-	-
		17. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	100	-	-	-
		18. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau (persen)	85	85	92,86	109,25
		19. Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80	80	80	100,00
		20. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau (persen)	65	-	-	-
		21. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	70	-	-	-

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau

IKU 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT

Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul ikan air payau yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang memproduksi calon induk ikan air payau. Adapun peruntukkan dari hasil produksi calon induk ikan air payau ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan ikan milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara menyeluruh untuk memproduksi benih. Ketersediaan sarana dan SDM diharapkan dapat dipenuhi oleh unit pembenihan yang akan mendapatkan calon induk ikan air payau ini.

Tabel 3. Capaian IKU Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	6.411	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk IK ini adalah sebesar 6.411 ekor. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester atau sistem perhitungan semesteran. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan UPT yang memproduksi calon induk unggul ikan air payau sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

IKU 2. Produksi Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT

Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul udang yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang memproduksi calon induk udang. Adapun

peruntukkan dari hasil produksi calon induk udang ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan udang milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara menyeluruh untuk memproduksi benih udang. Ketersediaan sarana dan SDM diharapkan dapat dipenuhi oleh unit pembenihan yang akan mendapatkan calon induk udang ini.

Tabel 4. Capaian IKU Produksi Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Produksi Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	191.744	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk IK ini adalah sebesar 191.744 ekor benih Udang. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester atau sistem perhitungan semesteran. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan UPT yang memproduksi calon induk unggul udang sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

IKU 3. Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat

Benih adalah ikan yang belum dewasa dengan ukuran, bentuk dan umur tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan. Penggunaan benih berkualitas baik merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha budi daya. Adapun benih berkualitas ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut antara lain:

1. Berasal dari unit pembenihan yang bersertifikasi;

2. Sehat, organ tubuh lengkap dan tidak cacat;
3. Ukuran benih seragam;
4. Responsif terhadap pemberian pakan;
5. Bebas pathogen dan bebas penyakit; dan
6. Diproduksi sesuai dengan standar produksi benih.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan benih bermutu. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi benih menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi benih ikan air payau yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang memproduksi benih ikan air payau. Adapun peruntukkan dari hasil produksi benih ikan air payau ini dapat disalurkan kepada pembudi daya ikan air payau baik perseorangan maupun kelompok yang berkomitmen dalam usaha pembudidayaan ikan dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya ikan air payau sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya ikan yang baik. .

Target IKU Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat pada periode Triwulan 1 tahun 2025 adalah 130.000 ekor, dari target tahun 2025 sebanyak 2.964.669 ekor. Capaian realisasi IKU tersebut sampai dengan TW I adalah 307.000 ekor, sedangkan jika dibandingkan dengan target tahunan didapatkan capaian sebesar 12,48%.

Tabel 5. Capaian IKU Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
130.000	370.000	120	-	-	2.964.669	12,48

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada periode Triwulan 1 sudah melebihi target pada periode yang sama, jika dipresentasikan realisasi sebesar 120% dari pada target yang ditentukan. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan UPT yang memproduksi benih ikan air payau sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

IKU 4. Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat

Benur adalah udang yang belum dewasa dengan ukuran, bentuk dan umur tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan udang. Penggunaan benur berkualitas baik merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha budi daya udang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan benur berkualitas. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi benur menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi benur udang yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang memproduksi benur udang. Adapun peruntukkan dari hasil produksi benur udang ini dapat disalurkan kepada pembudi daya udang baik perseorangan maupun kelompok yang berkomitmen dalam usaha pembudidayaan udang dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya udang sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya udang yang baik.

Target IKU Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat pada periode Triwulan 1 tahun 2025 adalah 6.000.000 ekor, dari target tahun 2025 sebanyak 40.058.988 ekor. Capaian realisasi IKU tersebut sampai dengan TW I adalah 6.800.000 ekor, sedangkan jika dibandingkan dengan target tahunan didapatkan capaian sebesar 16,97%.

Tabel 6. Capaian IKU Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
6.000.000	6.800.000	113,33	-	-	40.058.988	16,97

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada periode Triwulan 1 sudah melebihi target pada periode yang sama, jika dipresentasikan realisasi sebesar 113,33% dari pada target yang ditentukan. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan UPT yang memproduksi benih udang sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

IKU 5. Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT untuk Operasional UPT

Pakan ikan adalah bahan baku makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembang biakan baik berupa pakan ikan alami maupun pakan ikan buatan. Pakan ikan buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan. Pakan ikan buatan dapat dibedakan berdasarkan sifat yaitu: (1) pakan ikan terapung; (2) pakan ikan melayang; (3) pakan ikan tenggelam. Sedangkan pakan ikan buatan berdasarkan bentuk dapat berupa: (1) cair; (2) pasta; (3) tepung; (4) kapsul; (5) remah; (6) pellet.

Pembuatan Pakan Ikan harus memenuhi kriteria:

1. disiapkan dalam bentuk tepung untuk Bahan Baku Pakan Ikan butiran yang akan diolah;
2. penggunaan bahan tambahan untuk Pakan Pesanan Khusus sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan baku dan tahapan proses

pembuatan Pakan Ikan yang memperhatikan prinsip keamanan pangan; dan

3. formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan Pakan Ikan yang sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan

Indikator kinerja ini merupakan kegiatan produksi pakan ikan yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang dapat memproduksi pakan secara mandiri, guna menyediakan pakan berkualitas untuk operasional budi daya ikan yang di produksi.

Tabel 7. Capaian IKU Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi UPT untuk Operasional UPT

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi untuk Operasional UPT						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	94.670	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk IK ini adalah sebesar 94.670 kilogram. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester atau sistem perhitungan semesteran. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan UPT yang memproduksi pakan ikan air payau sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

IKU 6. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibinda Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)

Setiap unit usaha budi daya ikan baik pembenihan, pembesaran ikan diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara

Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), sedangkan usaha pendukung berupa usaha penyediaan pakan dan obat ikan juga diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) dimana hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa produk perikanan budi daya yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.

Direktorat teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) diwajibkan untuk melakukan pembinaan teknis terhadap unit pembenihan, unit pembesaran, unit produksi pakan, unit produksi obat ikan dan unit distribusi obat ikan. Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan tugas dan fungsi dalam kelembagaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fungsi sertifikasi dialihkan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHKP).

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan antara jumlah unit pembenihan, unit pembesaran dan unit produksi pakan/obat ikan yang dilakukan pembinaan oleh DJPB.

Tabel 8. Capaian IKU Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	207	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk IK ini adalah sebesar 207 unit. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem

perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan UPT yang memproduksi pakan ikan air payau sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

IKU 7. Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

IKU Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah jumlah sampel uji di laboratorium UPT Air Payau dalam rangka pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan yang terdiri dari pengujian kualitas air, patologi, mikrobiologi dan biologi molekuler. Capaian kegiatan ini dihitung berdasarkan jumlah sampel yang diuji. Target capaian indikator kinerja ini sebesar 5.376 sampel. Capaian indikator kegiatan ini di triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Capaian IKU Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
1.365	4.774	120	-	-	5.376	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada periode Triwulan 1 sudah melebihi target pada periode yang sama, jika dipresentasikan realisasi sebesar 120% dari pada target yang ditentukan. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan UPT yang memperikan pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan air payau sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

IKU 8. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji

Indikator kinerja Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dilaksanakan dengan koordinasi pengujian penyakit ikan air payau yang berada di pembudi daya ikan air payau. Capaian indikator kinerja ini diukur dengan cara menghitung jumlah sampel penyakit ikan air payau yang telah dilakukan monitoring di pembudi daya ikan air payau. Pada Tahun 2025 target indikator kegiatan ini sebesar 210 sampel. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	210	-

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena indikator kinerja ini merupakan kegiatan baru. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester atau sistem perhitungan semesteran. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan berkoordinasi dengan BPKIL Serang dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 9. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji

Indikator kinerja Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji yaitu jumlah sampel yang dilakukan monitoring kandungan residu obat ikan dan/atau metabolitnya, pestisida, dan/atau kontaminan pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi ikan air

payau di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2025 target indikator kegiatan ini sebesar 250 sampel. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel 11. Capaian IKU Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	250	-

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena indikator kinerja ini merupakan kegiatan baru. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester atau sistem perhitungan semesteran. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 10. Sampel Surveilan Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau

Indikator Kinerja ini merupakan jumlah sampel air pengujian AMR yang telah dilakukan pengujian atau pemeriksaan oleh laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan lingkup UPT Air Payau. Jumlah sampel ikan yang dilakukan pengujian resistensi antimikroba oleh UPT untuk mengetahui tingkat resistensi mikroba akibat penggunaan antimikroba. Semakin kecil tingkat resistensi mikroba semakin baik pengendalian resistensi antimikrobanya.

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 89 Tahun 2024 tentang rencana surveilan resistensi antimikroba tahun 2024, yang didalamnya memuat lokasi sampling, target sampel, target komoditas sampel, bakteri target dan sasaran antibiotik.

Pada tahun 2025 target indikator kegiatan ini sebesar 151 sampel. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel .

Tabel 12. Capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	151	-

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun sebelumnya juga belum ada capaian atau target yang ditentukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester atau sistem perhitungan semesteran. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 11. Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji

Indikator kinerja Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji adalah jumlah sampel nutrisi pakan, sampel obat dan sampel mutu pakan ikan air payau yang diuji oleh UPT Air Payau lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya. Pengujian nutrisi pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Sedangkan pengujian mutu pakan ikan yaitu pengujian

kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd, dan HG), antibiotik (nitrofuran, kloramfenikol, oksitertrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin. Pengujian sampel obat ikan adalah proses untuk menilai kualitas (mutu) obat ikan yang beredar yang dilakukan di laboratorium dan hasilnya dibandingkan dengan mutu obat ikan tersebut pada saat didaftarkan. Sedangkan pengujian lapangan adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan khasiat (eficacy) dan keamanan (safety) obat ikan pada ikan target pada kondisi sebenarnya dengan skala tertentu sesuai dengan indikasi yang tercantum pada etiket atau label.

Pada tahun 2025 target indikator kinerja ini sebesar 122 sampel. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Capaian IKU Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Nutrisi Pakan dan Obat Ikan yang Diuji						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	122	-

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena indikator kinerja ini merupakan kegiatan baru. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester atau sistem perhitungan semesteran. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan berkoordinasi dengan UPT dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 12. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau

Indikator Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau merupakan kegiatan penyusunan Norma, Kriteria, Standar dan Prosedur (NSPK) bidang

budi daya ikan air payau. Rekomendasi kebijakan ini sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dikarenakan untuk berkembangnya perikanan budi daya di Indonesia khususnya budi daya ikan air payau maka dibutuhkan suatu input sarana dan prasarana produksi yang memadai dalam rangka menunjang peningkatan produksi budi daya dalam hal ini adalah penyusunan NSPK untuk mendukung tata kelola bidang produksi dan usaha budidaya. Dalam pengertian singkatnya, norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah, sedangkan Kriteria adalah ukuran yang dipakai menjadi dasar dalam penyelenggaraan. NSPK dapat mempertegas dan memperjelas mekanisme dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Pada tahun 2025 target indikator kinerja ini yaitu sebanyak 6 rekomendasi kebijakan. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator jumlah rekomendasi hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14. Capain IKU Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	6	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah 6 rekomendasi kebijakan. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun sebelumnya juga belum ada capaian atau target yang ditentukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun

atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 13. Irigasi Perikanan yang Dikelola Secara Partisipatif (PITAP)

Irigasi Perikanan yang Dikelola Secara Partisipatif adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi tambak tersier berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan. Saluran tersier adalah saluran irigasi tambak yang mengalirkan air dari saluran primer/sekunder ke kawasan tambak. Target indikator kinerja ini sebesar 25 unit.

Tabel 15. Capaian IKU Irigasi Perikanan yang Dikelola secara Partisipatif (PITAP)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Irigasi Perikanan yang Dikelola secara Partisipatif (PITAP)						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	25	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah 25 unit. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena merupakan indikator kinerja baru. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 14. Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)

Indonesia sebagai produsen udang terbesar dunia dengan pangsa pasar global dan pasar ekspor di dunia berkesempatan untuk bekerjasama dengan Asian Development

Bank (ADB) dalam rangka meningkatkan produktivitas udang nasional. Peningkatan produksi udang dilakukan melalui kegiatan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture dengan harapan kuantitas dan kualitas udang nasional semakin meningkat di pasar global.

Untuk mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas budi daya udang yang terintegrasi, berkelanjutan dan ramah lingkungan maka diperlukan beberapa upaya seperti pembangunan pusat produksi induk dan benih (broodstock center), Pembangunan laboratorium kesehatan ikan, pembangunan tambak di lahan UPT Ditjen Perikanan Bud Daya KKP, Pembangunan tambak udang berbasis Kawasan dan Pembangunan tambak udang di masyarakat. Capaian indikator kegiatan tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Capaian IKU Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	7	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah 7 unit. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena merupakan indikator kinerja baru. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dan koordinasi antar UPT pelaksana dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2) : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Dit. Ikan Air Payau

IKU 15. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi SAKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Pada tahun 2025 target indikator kinerja Nila PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau sebesar 84. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Capaian IKU Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	84	-

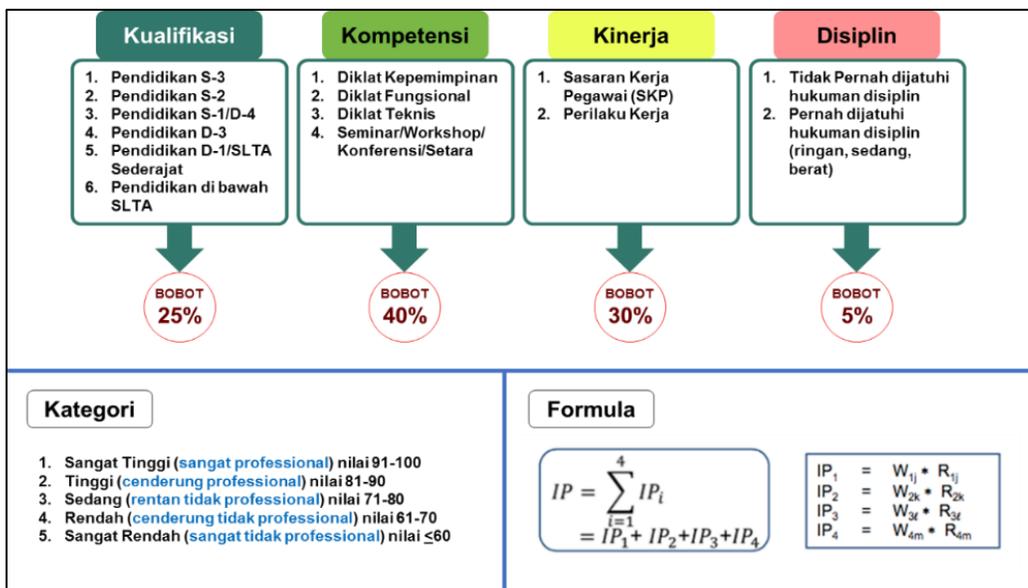
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target nilai yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah 84. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun sebelumnya juga belum ada capaian atau target yang ditentukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam hal pemenuhan dokumen SAKIP dan data dukung untuk mencapai target nilai yang telah di tentukan.

IKU 16. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau

Indikator kinerja ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;

2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/sejenis);
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



Gambar 6. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/*workshop*/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

Pada tahun 2025 target IKU IP ASN sebesar 81. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja IP ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	81	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target nilai yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah 81. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun sebelumnya juga belum ada capaian atau target yang ditentukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester atau sistem perhitungan semesteran. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam hal peningkatan nilai IP ASN dan memberikan informasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai nilai yang ditentukan.

IKU 17. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau

Secara umum indikator kinerja ini dapat diartikan sebagai bentuk penyelesaian atau penilaian akhir terhadap hasil temuan pemeriksaan oleh BPK terhadap satu periode kinerja pemerintahan. Nilai temuan tersebut didasarkan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Suatu kewajiban bagi instansi terkait untuk menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK. Hasil tindak lanjut tersebut dilakukan agar pengelolaan keuangan setiap instansi sesuai dengan sistem pengendalian intern dan peraturan perundang-undangan. Berikut di bawah ini tabel capaian persentase penyelesaian LHP BPK oleh satker Direktorat Ikan Air Payau du Triwulan I.

Tabel 19. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	100	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena pada tahun lalu indikator kinerja ini tidak dimunculkan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem

perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit dan telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Ikan Air Payau yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Ikan Air Payau dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya.

Pada tahun 2025 target IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan sebesar 85. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator jumlah rekomendasi hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
85	92,86	109,25	100	92,86	85	109,25

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah 85%, dengan capaian nilai pada Triwulan 1 tahun 2025 sebanyak 92,86%. Pada indikator kinerja manajerial ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 pada periode yang sama persentasenya sebesar 92,86%. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan keperluan sehari-hari perkantoran. Indikator ini menjadi pendukung untuk mencapai kegiatan manajemen internal Dit. Ikan Air Payau berupa layanan persuratan, tata usaha, kearsipan, operasional dan pemerliharaan kantor. Pada tahun 2025 target indikator kinerja ini yaitu 80 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kegiatan layanan perkantoran dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 21. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
80	80	100	10,65	751,17	80	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 80%. Perhitungan capaian indikator kinerja ini berasal dari aspek kehadiran pegawai, pengelolaan SDM aparatur, persuratan dan kerumah tanggaan, dengan capaian nilai pada Triwulan 1 tahun 2025 sebanyak 80%. Pada indikator kinerja manajerial ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 pada

periode yang sama perbandingannya capaian tahun ini lebih besar 751,17%, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan cara perhitungan sehingga perbedaannya sangat besar. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 20. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP, tidak termasuk Probis Level 0, Level 1, Level 2 dan Level 3. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Berikut ini tabel capaian realisasi indikator kinerja pada periode Triwulan I tahun 2025:

Tabel 22. Capaian IKU Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	65	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 65%. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 21. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut ini tabel capaian realisasi indikator kinerja pada periode Triwulan I tahun 2025:

Tabel 23. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2025			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2025 Thdp TW I 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	70	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2025 untuk IK ini adalah sebesar 70. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau sistem perhitungan tahunan. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja kearsipan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB IV. PENUTUP

Direktorat Ikan Air Payau merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautandan Perikanan Republik Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budi daya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Payau berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Direktur dan/atau Pelaksana Tugas Direktur Ikan Air Payau.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan 1 tahun 2025 telah menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh selama periode Triwulan 1 tahun 2025. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam Bab III, dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau sampai akhir periode Triwulan 1 tahun 2025 dari total 21 (dua puluh satu) indikator kinerja pendukung sasaran strategis, sejumlah 5 (lima) indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai target yang telah ditentukan yaitu mengintensifkan koordinasi dengan UPT khususnya yang pada bidang budi daya ikan air payau lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.